

POTRET REPRESENTASI GERAKAN PEREMPUAN DALAM MENDORONG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI BANTEN

Gilang Ramadha, Ika Arinia Indriyany

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email : gil.pas2000@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted to see the progress of the women's movement in Banten. The women's movement arises because of the political opportunity structure that provides space for women to maximize the resources they have to form social movements. As a representation of the women's movement, GOW has a role in realizing women-friendly policies and food security through one of the organizations under it, namely KWT which focuses on the empowerment of women farmers. This study uses a descriptive qualitative approach, while the results of the research are descriptions of a phenomenon in different contexts so that the conclusions of each individual will be different depending on the point of view used. In the midst of gender mainstreaming in social movements, this research is expected to open the veil of space for the women's movement, especially in the context of encouraging women-friendly policies and maximizing the role of women in promoting food security.

Keywords: *Women Movement, Policy, Food Security*

PENDAHULUAN

Gerakan sosial merupakan salah satu kajian di dalam Ilmu Pemerintahan, yang memotret bagaimana masyarakat sipil terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan. Sebagai salah satu cabang dari gerakan sosial, gerakan perempuan hadir sebagai upaya untuk mengangkat posisi perempuan baik di kehidupan masyarakat maupun ranah kebijakan publik (Fitri & Akbar, 2017). Gerakan ini muncul karena memang ada *political opportunity structure* yang memberikan ruang bagi perempuan untuk memaksimalkan *resources* yang mereka punya untuk membentuk gerakan sosial (Indriyany, Hikmawan, & Mayrudin, 2019). Keberadaan gerakan sosial menjadi penting untuk mendorong terjadinya perubahan sosial.

Perubahan sosial akan memicu perubahan di sektor lainnya (Hikmawan, Indriyany, & Mayrudin, 2019).

Di Provinsi Banten, dengan keberadaan pemimpin perempuan di aras lokal, gerakan perempuan justru sulit untuk dilacak. Hal ini menjadi ironi karena gerakan perempuan hadir untuk membawa isu - isu perempuan dalam tahapan pembuatan kebijakan. Di tataran negara, dibentuk organisasi payung atas kelompok perempuan dengan nama GOW (Gabungan Organisasi Wanita). Organisasi ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi maupun gerakan perempuan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seperti misalnya PKK, Dharma Wanita, Bhayangkari, dll. GOW menjadi perpanjangan tangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam menjalankan program – programnya.

Tapi penting untuk melacak lebih lanjut apakah memang keberadaan GOW ini memang merepresentasikan gerakan akar rumput atau hanya gerakan yang sifatnya elitis. Ketika hanya bersifat elitis, maka kepentingan perempuan juga akan minim terwakilkan. Termasuk juga untuk melacak sejauh apa pemerintah melibatkan organisasi perempuan dalam tata kelolanya.

GOW sendiri memiliki bermacam-macam unsur yang tergabung di dalamnya, seperti diantaranya dari unsur Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharmawanita, Badan Kontak Majelis Taklim, Bhayangkari, Persit, dan Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT merupakan merupakan organisasi perempuan yang fokus pada bidang pertanian, kelompok ini memiliki program bernama Pekarangan Pangan Lestari (P2L) yang merupakan program menanam tanaman produktif pada masing-masing pekarangan rumah atau lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan.

KWT merupakan strategi untuk memaksimalkan peran perempuan tani dalam mengoptimalkan lahan dengan berbasis kolektif, diantaranya dengan membentuk koperasi dan usaha kecil yang targetnya adalah perempuan. Nowak dan Caulfield (2008) mengungkapkan bahwa dengan membentuk suatu kegiatan kolektif, organisasi wanita dapat membuka kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan kemampuan kepemimpinan, membangun kepercayaan diri dan membantu membina hubungan dengan kelompok lain untuk berkolaborasi (Stempel, 2011).

Hambatan yang tak ayal menghalangi KWT adalah permasalahan lahan. Hampir semua kelompok KWT mendapatkan tanah dengan cara meminjam lahan dari pemilik yang juga anggota KWT atau penduduk desa lainnya. Ada beberapa kasus tanah yang dipinjam tidak memiliki dasar perjanjian yang jelas sehingga KWT harus memberikan kembali hasil panen mereka kepada pihak pemilik lahan. Laporan Pemberdayaan Ekonomi Wanita (UNFPA, 2007) menjelaskan bahwa factor kepemilikan yang jelas terhadap perempuan menjadi penghalang untuk mendapatkan rasa aman berbasis kepemilikan harta dan ini berarti walaupun hanya sebatas sebagai penggarap lahan, perempuan hampir tidak punya kuasa apapun atas lahan tersebut (Strempele, 2011).

Permasalahan diatas perlu untuk digali lebih dalam, *pertama* untuk memotret peran GOW secara organisasi apakah sudah berhasil merepresentasikan kepentingan perempuan di dalam agendanya ataukah hanya sebatas kepanjangan tangan dari kepentingan elit. *Kedua* bagaimana gerakan yang dilakukan oleh KWT dalam meningkatkan kiprah perempuan tani dan mewujudkan ketahanan pangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian jenis ini akan menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dari orang yang diteliti. Sedang hasil penelitiannya adalah deksripsi dari sebuah fenomena dalam konteks berbeda sehingga kesimpulan dari masing – masing individu akan berbeda tergantung sudut pandang yang digunakan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014).

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Studi kasus. Studi kasus merupakan desain penelitian dimana proses penelitiannya dilakukan secara mendalam dan komprehensif pada kasus yang dipilih oleh peneliti (Creswell & Creswell, 2018). Oleh karena itu, maka kasus yang dipilih juga merupakan kasus yang spesifik, mendetail, unik dan menarik (Yin, 2003). Dalam penelitian ini, kasus yang dipilih adalah potret representasi gerakan perempuan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Provinsi Banten.

Proses pencarian data dilakukan dengan metode studi pustaka, Dalam penelitian ini, studi pustaka yang dilakukan adalah kajian terkait dokumen yang memiliki kaitan dengan kebijakan ketahanan pangan maupun organisasi perempuan di Provinsi Banten. Mulai dari dokumen

kebijakan yang telah, sedang atau akan dirumuskan dan juga pustaka terkait konsep yang digunakan.

KERANGKA TEORI

1. Gerakan Sosial

Gerakan sosial dapat dimaknai sebagai serangkaian tindakan yang rasional dengan tujuan dan motivasi yang jelas, dan lebih masuk akal jika dibandingkan dengan tindakan yang bersifat emosional, selain itu actor yang terlibat dalam gerakan sosial juga memiliki wawasan dan visi ke depan (Smelser, 2011). Sebagai sebuah gerakan yang rasional, gerakan sosial berbeda dengan aksi kolektif dimana dalam aksi kolektif seringkali diasosiasikan dengan pemberontakan, kerusuhan rakyat, huru hara, perilaku yang tidak rasional serta tujuan dan motivasi gerakan yang tidak jelas.

Ada 3 fase yang dapat digunakan untuk memahami lebih lanjut gerakan sosial yaitu *interest*, *protest*, dan *perspective* (Smelser, 2011). Pada fase yang pertama yaitu *interest*, beberapa actor yang memiliki kepentingan, nilai maupun komitmen yang sama mengagregasikan diri. Mereka bergabung atas keyakinan yang sama atas sebuah nilai. Agregasi ini muncul disebabkan karena berbagai hal seperti pemingguran, kelas sosial, diskriminasi, dan lainnya. Fase kedua yaitu *protest*, dapat dimaknai 2 hal yaitu ketika isu yang awalnya hanya didasarkan pada kesamaan antara individu, mampu menarik lebih banyak orang untuk terlibat menyelesaikan isu tersebut atau ketika kekecewaan muncul saat isu yang diangkat tidak mampu membawa perubahan di masyarakat. Sehingga menuntut adanya perubahan strategi oleh actor gerakan sosial. Ketiga, *perspective*, yaitu saat isu yang dibawa mampu menyentuh segmen populasi yang lebih luas meskipun pada level komitmen yang berbeda – beda ketika terlibat dalam gerakan sosial.

Kemunculan gerakan sosial sendiri dapat dilihat berdasarkan empat pendekatan yaitu *breakdown theory*, *resources mobilization theory*, *political opportunity* dan *framing theory* (McAdam, 1982). Dalam penelitian ini, pendekatan yang akan digunakan adalah *political opportunity*. Pendekatan ini melihat peluang dari munculnya sebuah gerakan adalah karena adanya perubahan dalam struktur politik sehingga memunculkan kesempatan politik.

Keberadaan sumberdaya eksternal dalam sebuah gerakan menjadi factor pendukung keberhasilan. Sumberdaya eksternal ini misalnya iklim demokratis. Iklim yang demokratis membuka ruang adanya partisipasi dari masyarakat sehingga gerakan sosial dapat muncul. Demokrasi juga menjanjikan keseimbangan politik baru ketika masyarakat mampu mengakses Lembaga politik yang ada.

1. Representasi

Representasi adalah kegiatan membuat suara warga, opini, dan perspektif hadir dalam proses kebijakan publik (Pitkin, 1967). Sebagai satu bentuk modern dari demokrasi, representasi menjadi penting untuk dilakukan untuk mewujudkan demokrasi minimalis ala Schumpeter. Demokrasi ala ini dimaknai sebagai mekanisme kompetitif untuk memilih pemimpin melalui prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik melalui cara memberikan kekuasaan pada individu untuk membuat keputusan dalam rangka memperoleh suara rakyat (Schumpeter, 2017). Demokrasi perwakilan dianggap sebagai titik pijak utama karena demokrasi dianggap tidak akan bisa berjalan justru ketika seluruh rakyat memerintah, karena menurut Schumpeter kehendak rakyat adalah sesuatu yang bersifat sangat ambigu. Oleh karena itu representasi menjadi penting.

Representasi sangat berkaitan dengan jaminan terpenuhinya hak setiap warga negara karena representatif memiliki kewajiban untuk membawa kepentingan warga negara yang diwakilinya. Unsur utama yang harus ada dalam representasi adalah representatif (yang mewakili), *the represented* (yang diwakili), kepentingan yang diwakili dan konteks atau setting sosial politik (Pitkin, 1967). Unsur ini merupakan unsur utama yang tanpa salah satu diantaranya maka representasi tidak akan mampu berjalan baik.

Representasi terbagi menjadi beberapa bentuk. Pertama, representasi formalistik, dimana perwakilan dipahami dalam dua dimensi yaitu otoritas dan akuntabilitas. Otoritas berkaitan dengan otorisasi apa saja yang diberikan oleh konstituen pada wakilnya, sehingga ketika wakil melakukan sesuatu di luar otoritasnya maka mereka dianggap tidak lagi sedang menjalankan fungsi perwakilan. Dimensi kedua yaitu akuntabilitas menjelaskan tentang adanya kewajiban pertanggungjawaban dari wakil pada konstituen

atas otoritas yang sudah diberikan. Pertanggungjawaban ini berkaitan dengan apa saja yang wakil kerjakan.

Kedua, representasi deskriptif. Representasi ini mensyaratkan adanya wakil yang berasal dari kelompok yang diwakilkan (*standing for representative*). Sehingga yang dianggap sebagai wakil yang ideal adalah representatif yang merefleksikan kelompok-kelompok masyarakat sesuai dengan yang diwakilinya. Walaupun memang terkadang wakil tidak secara inheren melakukan sesuatu untuk kepentingan kelompok yang diwakilinya karena mereka bertindak tidak berniat atas nama kelompok. Ketiga representasi simbolik dimana wakil atau representatif merupakan simbol atau mewakili simbol dari kelompok yang diwakili.

Keempat, representasi substantif. Bentuk representasi ini adalah saat representatif bertindak untuk (*act for*) dalam rangka membawa kepentingan dari yang diwakilinya ke ranah kebijakan publik. Representasi ini merujuk pada kualitas perwakilan dimana orang yang diberi otoritas untuk mewakili bertindak menggantikan orang yang diwakili dengan penuh tanggung jawab. Pola ini bergerak menggantikan pihak yang diwakilinya, tidak sekedar menyerupai atau mengidentifikasi sebagaimana dalam representasi deskriptif dan simbolik.

A. Penelitian Terdahulu

Pertama peneliti ingin mengkaji tulisan dari Panggio Restu Wilujeng yang menulis tentang *Girls Punk : Gerakan Perlawanan Subkultur di Bawah Dominasi Maskulinitas Punk* pada tahun 2017. Tulisan ini membahas tentang bagaimana gerakan-gerakan *Girls Punk* dengan identitas perempuan yang pada awalnya ingin mendobrak dominasi budaya feminim, kemudian justru berkembang menjadi gerakan yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan *punk* itu sendiri. Gerakan *punk* perempuan ini digambarkan berusaha melawan norma budaya feminim yang dominan dengan jalan masuk ke kelompok *punk* yang didominasi oleh laki-laki. Dalam beberapa kasus, pengikut *punk* perempuan kadang mendapatkan opresi dan dominasi dari *punk* laki-laki yang kasar dan mendominasi sehingga *punk* perempuan selalu diposisikan sebagai sub ordinat.

Tulisan ini menggunakan teori *subculture* dengan metode studi pustaka dengan melakukan analisis konten. Tulisan ini menggambarkan bagaimana perlawanan yang dilakukan oleh kelompok *Girls Punk* dengan menggunakan media music, dan mengerucut kepada hasil bahwa *subculture* tidak melulu mengenai ideologi perlawanan, tetapi juga dapat berwujud sebagai konstruksi dan kontestasi identitas yang muncul di tengah budaya dominan. Kemunculan *Girls Punk* membawa bentuk baru dalam *subculture punk*. *Punk Girls* menjadi bentuk *subculture* yang berada di dalam *Subculture Boys Punk* yang lebih dominan. Kendati demikian, ideologi utama yang dibawa oleh *Punk Girls* berbeda dengan ideologi *Boys Punk*. *Boys Punk* membangun ideologi mereka pada gerakan anti kapitalisme, sedangkan *Punk Girls* mengadopsi ideologi *counter culture* terhadap norma dan budaya feminitas baik gerakan *Punk Girls* yang ada Indonesia maupun di Barat (Restu, 2017).

Tulisan kedua adalah Aquarini Priyatna, Mega Subekti, dan Indriyani Rachman yang menulis tentang Ekofeminisme dan Gerakan Perempuan di Bandung pada tahun 2017. Tulisan ini menggambarkan kegiatan dan aktivisme gerakan perempuan di Bandung yang berkuat pada persoalan lingkungan, dengan menggunakan perspektif ekofeminisme. Penelitian berfokus kepada tiga perempuan sebagai objek penelitian yang terlibat aktif dalam komunitas lokal di Bandung selain kapasitasnya sebagai ibu rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, informasi digali melalui wawancara dan observasi secara langsung. Temuan dalam penelitian ini adalah ketiga perempuan yang menjadi objek penelitian, ternyata di tengah perannya sebagai ibu rumah tangga justru menempatkan mereka pada subjek yang sadar lingkungan. Ketiganya menunjukkan bahwa pengalaman domestik/feminin sebagai ibu dan istri membuat mereka bergerak untuk mengatasi dan memperbaiki lingkungan yang ada di sekitar mereka. Meskipun acapkali dianggap sebagai sesuatu yang sederhana dan bersifat lokal, kegiatan dan aktivisme yang mereka lakukan bersama komunitasnya dapat dikategorikan sebagai sebuah gerakan ekofeminisme. Tidak saja karena posisi dan status mereka sebagai ibu rumah tangga akan tetapi juga karena kegiatan dan aktivisme yang berwujud organisasi seperti CGSI, Bumi Inspirasi dan PKK itu mampu berdampak pada

kelestarian lingkungan. Organisasi yang diikuti oleh ketiga perempuan tersebut ternyata dapat menjadi strategi ideologis, politis, dan kultural bagi perempuan dalam kiprahnya untuk mewujudkan perubahan sosial (Priyatna, Subekti, & Rachman, 2017).

PEMBAHASAN

Gabungan Organisasi Wanita (GOW) merupakan perwujudan dari Badan Penghubung Organisasi Wanita (BPOW) yang dibentuk untuk merepresentasikan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) di tingkat pusat pada level daerah. GOW terdiri dari berbagai organisasi kewanitaan yang ada di daerah, yang dibentuk oleh kaum wanita yang memiliki keterampilan yang berdampak dalam lingkungan sosial atau minimal memiliki kemampuan dalam menyokong perekonomian keluarganya. Karena merupakan orang-orang yang terpilih, maka GOW dituntut untuk menjadi representasi perempuan dalam meneruskan kepentingannya serta sebagai gerakan pemberdayaan untuk mengangkat perekonomian perempuan pada lingkungan sosialnya.

Ada beragam organisasi kewanitaan yang tergabung dalam GOW, diantaranya organisasi yang bergerak di bidang pertanian yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT). Dalam hal ini penelitian akan fokus dalam membedah kiprah gerakan Kelompok Wanita Tani Banten sebagai representasi perempuan dalam mendorong kebijakan yang melibatkan perempuan dalam memenuhi ketahanan pangan. KWT merupakan perkumpulan petani wanita yang mendorong kemandirian perempuan dalam bidang pertanian melalui beragam cara, seperti peningkatan pendidikan, ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Pendidikan Pertanian

Dalam bidang pendidikan ada beragam masalah yang masih menjadi perhatian, yaitu kurangnya pemahaman warga pedesaan khususnya wanita tani dalam memahami bagaimana proses pertanian yang baik dari proses penanaman, penanganan panen dan pasca panen, bagaimana memelihara tanaman, bagaimana mengendalikan hama dan penanganannya, dan proses penyuburan tanaman melalui metode pemupukan. Para petani mengalami kebuntuan representasi, bagaimana mereka mendapatkan pendidikan agar dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen.

Untuk mengakses otoritas yang memiliki sumberdaya pelatihan pertanian tidak dapat dilakukan oleh petani secara individual, mereka tidak memiliki saluran yang dapat membantu dalam urusan pendidikan pertanian. Kebuntuan ini yang kemudian dibaca oleh KWT untuk meneruskan urusan petani kepada otoritas yang berwenang yaitu Dinas Pertanian di tingkat Provinsi Banten atau dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di setiap kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Seperti di Kota Cilegon misalnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meluncurkan Program Kampung Ramah Lingkungan (PROKARLING) yang bertugas dalam memberikan pelatihan dan pembekalan bagi petani untuk meningkatkan produktivitas tani. PROKARLING dalam banyak tempat didampingi pelaksanaannya oleh KWT yang ada di desa-desa (Sulfiana, 2019).

Dalam hal pendidikan pertanian KWT dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian juga meluncurkan program 1 RT 1 sayuran yang ditanam di pekarangan rumah, program ini sebagai bentuk aktualisasi pendidikan pertanian bagi perempuan yang tidak memiliki usaha tani atau tidak memiliki lahan yang luas tetapi ingin meningkatkan taraf kesejahteraan keluarganya melalui pertanian sederhana. Program ini meliputi pelatihan cara membuat media tanam, penanaman, sampai pembuatan pupuk organik yang ramah lingkungan. Tidak hanya diajarkan bagaimana cara menanam yang baik pada lahan yang terbatas, tetapi petani wanita juga diajarkan budidaya tanaman variatif atau ekstentifikasi pertanian dan lebih dikenal sebagai sub sayuran, hal ini didorong dari kebutuhan variasi sayuran yang dapat dihasilkan dalam satu kali panen, apabila satu jenis gagal panen maka masih bisa disubstitusi oleh hasil panen lainnya sehingga tidak mengalami kerugian akibat gagal panen. Sub sayuran ini memiliki ketua masing-masing dari jenis sayuran yang ditanam dan masing-masing ketuanya dibina oleh KWT (Sulfiana, 2019).

Peningkatan Ekonomi

Permasalahan ekonomi yang biasa muncul di pedesaan di Banten adalah banyaknya perempuan usia produktif yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak memiliki penghasilan yang maksimal dari usaha mereka karena belum memiliki kemampuan dalam mengelola usaha yang baik serta mendistribusikan hasil usaha. Permasalahan ini kemudian dicoba untuk dicarikan jalan keluar oleh KWT dengan membentuk koperasi

usaha untuk memotong rantai distribusi yang Panjang, serta untuk menjaga harga hasil panen yang biasanya cenderung turun pada saat panen raya. Para petani wanita juga dibiasakan untuk menabung dari hasil panennya melalui koperasi tersebut yang disetorkan melalui ketua sub sayuran masing-masing.

Salah satu unsur pemberdayaan adalah partisipasi ekonomi perempuan, dimana perempuan dilibatkan dalam membantu perekonomian keluarga dan didorong agar dapat hidup secara mandiri. Hal ini menjadi penting karena selain dapat mengurangi angka kemiskinan pada perempuan, juga dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga dan memicu pertumbuhan ekonomi secara garis besar.

Selain menjual sayuran mentah, sebagai *value added* yang ditawarkan oleh KWT untuk program 1 RT 1 sayur juga dengan membentuk usaha rumahan yang memanfaatkan bahan mentah sayuran, bahan makanan jadi ini nantinya selain dijual di koperasi desa juga akan diikutsertakan dalam bazar dan pameran UMKM sehingga nantinya para petani wanita bisa mendapatkan jejaring distribusi hasil usahanya yang lebih luas untuk pengembangan usaha.

Pemanfaatan hasil pertanian sebagai bahan baku industry rumahan di Banten juga menghasilkan beragam inovasi, salah satunya ditemukan pada KWT Mawar Desa Paniis Kabupaten Pandeglang, di desa ini KWT Mawar berhasil mendorong inovasi penciptaan tepung mocaf, tepung cassava, kacang umpet, dan keripik bawang yang dioleh dari bahan Ubi kayu. (Zulhaedar & Mardiana, 2016) keberhasilan KWT mawar dalam menciptakan inovasi pangan tidak terlepas dari peran Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pandeglang, karena dari transfer ilmu untuk penciptaan sampai pemasaran mendapat pendampingan dari dinas terkait.

Kesadaran Lingkungan

Berkurangnya lahan pertanian sampai penurunan kualitas tanah adalah dampak lingkungan dari industri yang sering kali beririsan dengan lahan pertanian. Padahal wilayah Banten merupakan wilayah yang didominasi oleh kawasan industri, setidaknya ada 20 kawasan industri yang tersebar di seluruh Banten yang meliputi Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. Belum lagi Kawasan

industri yang tidak terintegrasi dan menyebar di kawasan pertanian dan pemukiman warga.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten menyatakan bahwa ada beberapa kota dan kabupaten di wilayah banten yang dalam amar putusan DPRD akan dijadikan Kawasan industry besar yang secara langsung akan dapat menggusur lahan pertanian, daerah tersebut paling banyak didominasi Tangerang Raya. (Hamid, Nurrohman, Hikmawan, & Ramadhan, 2020) Hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan jangka Panjang yaitu berkurangnya pasokan pangan yang biasanya dapat dihasilkan dari daerah tersebut. Secara politik PWT tidak memiliki wewenang untuk merubah putusan legislatif tersebut, tetapi secara akar rumput PWT melakukan grilya dengan mengadakan penghijauan di desa-desa yang berbatasan dengan kawasan industri sebagai bentuk perlawanan terhadap tercabutnya hak-hak mereka untuk bertani dan mendapatkan lingkungan yang sehat (Sulfiana, 2019).

KWT Maju Makmur di Kelurahan Randasari Kota Cilegon misalnya memiliki lingkungan yang diapit oleh kawasan industri, sehingga selain kesulitan untuk mengembangkan usaha tani juga sulit untuk mendapatkan kualitas udara yang baik. Sebagai bentuk perlawanan KWT Maju Makmur melakukan aksi penanaman beragam jenis sayuran di masing-masing pekarangan rumah untuk menjaga kualitas udara serta membangun fasilitas pengelolaan sampah. Dari hasil penghijauan Kelurahan Randasari kemudian beralih menjadi kampung wisata dan dapat membalik dominasi kawasan industri yang menggeliat di sekelilingnya.

Peran Sosial

Pada banyak daerah yang mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat patriarki, perempuan belum banyak memainkan peranan yang menentukan dalam pergaulan sosial. Kaum wanita hanya sebatas diberikan pekerjaan domestik yang mencakup lingkup rumah tangga yang berbeda dengan pekerjaan laki-laki yang dituntut untuk dapat memenuhi nafkah dengan melakukan pekerjaan dan beraktifitas sosial. Hal ini kemudian didorong oleh KWT agar perempuan yang berstatus sebagai ibu rumah tangga juga dapat mampu memberikan kontribusi sosial di lingkungannya.

Dengan adanya aktifitas pertanian yang dilakukan secara berkelompok dengan perempuan lain yang ada dalam satu desa, maka akan ada interaksi sosial yang terjadi, dan interaksi sosial ini yang menjadi bekal dalam membentuk solidaritas warga. Solidaritas yang kuat antara sesama perempuan akan membentuk daya tawar tersendiri akan posisi perempuan tani di lingkungannya, apalagi dengan didukung oleh kapasitas finansial yang mulai terbangun dari hasil pertanian sehingga perempuan bisa memiliki andil dalam perekonomian di keluarganya.

Proses pemberdayaan perempuan diperlukan adanya *consciousness* dalam proses pembentukan kapasitas terhadap partisipasi yang mengalir deras untuk memiliki kekuatan (*power*) dalam proses pengambilan keputusan dan transformasi (*transformation*) supaya perempuan dapat memiliki kemampuan dalam berbuat sesuatu yang baik. (Sulfiana, 2019) hal ini dapat terlihat dari peran KWT yang dapat memberikan akses kepada kaum perempuan yang ada di desa untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan yang ada di lingkungannya. Banyak kaum perempuan dapat terdorong untuk melakukan aktivitas sosial seperti gotong royong dan bekerja bakti untuk menjaga lingkungan lingkungan sekaligus melakukan aktivitas pertanian.

Political Opportunity

Eisinger mengungkapkan bahwa ada empat hal yang mempengaruhi kesempatan politik, yang pertama dan kedua adalah tabiat dari pemerintah dan model pemilihan umum, kedua poin ini sangat erat kaitannya dengan struktur, yang ketiga dan keempat adalah distribusi keadilan sosial dan status dan derajat dari ketimpangan sosial, kedua poin ini erat kaitannya dengan agen. Keempat faktor tersebut baik yang digerakkan secara perorangan maupun organisasional digunakan untuk mencapai tujuan politik atau untuk melawan dari tujuan politik tersebut. (Karl Dieter, 2009)

Eisinger mengungkapkan bahwa gerakan sosial merupakan fungsi dari kesempatan politik, gerakan sosial sangat bergantung dari kesempatan politik yang ada, saat kesempatan politik terbuka lebar maka akan mudah gerakan sosial terbentuk, juga sebaliknya. Dalam mekanisme *political opportunity* ada beberapa variable yang menentukan, diantaranya adalah gerakan sosial akan muncul ketika tingkat akses

terhadap Lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. (Karl Dieter, 2009) Hal ini yang menjadi perhatian dari penelitian ini tentang bagaimana posisi KWT yang dekat dengan beberapa instansi pemerintahan dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Posisi KWT sebagai aktor yang berpengaruh terhadap kebijakan semakin diperhitungkan dengan adanya status sebagai organisasi yang berpengaruh di desa. Dari beberapa desa yang dijadikan desa wisata di Provinsi Banten ada yang merupakan buah dari tangan dingin KWT yang berhasil memberdayakan perempuan di desa. Banyak kemudian berdatangan dinas-dinas yang melakukan studi banding, penelitian, sampai memberikan beragam bantuan untuk pengembangan kapasitas KWT.

Dengan terbukanya struktur politik tersebut maka akan memudahkan KWT untuk menyuarakan kepentingannya dalam mendukung pemberdayaan perempuan tani. Akan tetapi terbukanya kesempatan politik tersebut dapat diartikan berbeda ketika instansi pemerintah yang mendekati dan mendukung program dari KWT sebatas untuk mendisiplinkan gerakan KWT. Karena hampir setiap program yang dijalankan oleh KWT biasanya akan berdampingan dengan program instansi yang terkait seperti dinas ketahanan pangan dan pertanian atau dinas lainnya yang memiliki irisan program. Hal ini tentu saja dikhawatirkan akan mengecilkan perjuangan KWT sendiri dari mendorong kemandirian perempuan jadi sekedar hanya pelaksana dari program dinas terkait.

Sebagai representasi dari perempuan, KWT sudah banyak memiliki peran secara langsung sebagai agen yang dapat memperjuangkan distribusi keadilan sosial dan status serta memperkecil ketimpangan sosial yang terjadi dalam struktur masyarakat. Hal ini karena KWT sendiri merupakan bagian dari masyarakat tani biasa dan bukan dari kalangan elit yang memiliki sumber daya yang mumpuni dalam memperjuangkan kepentingan perempuan. Bentuk representasi *action for* atau bertindak untuk dijalankan KWT melalui beberapa program pemberdayaan serta menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan kepada dinas-dinas terkait sehingga suara perempuan terkait urusannya dapat diserahkan kepada KWT.

KESIMPULAN

KWT merupakan bagian dari GOW Provinsi Banten yang memiliki fokus dalam menjalankan program pemberdayaan perempuan di bidang pertanian. Pada pelaksanaannya KWT agak berbeda dengan GOW secara format gerakan karena KWT berasal dari akar rumput maka mereka banyak melakukan pemberdayaan yang melibatkan masyarakat serta manfaatnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Sedangkan GOW memiliki corak gerakan elit karena berasal dari kalangan elit birokrasi sehingga programnya dirasakan hanya bersifat selebratif dan kurang menyentuh substansi kebutuhan masyarakat.

Sebagai representasi perempuan petani, KWT dapat digambarkan sebagai bertindak untuk (*action for*) atau representasi substantif dalam terminology Pitkin (Pitkin, 1967), hal ini dapat dilihat dari bagaimana KWT dapat bertindak sebagai perwakilan perempuan tani dalam menyuarakan urusan perempuan tani kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian di masing-masing kabupaten kota yang ada di Banten, sehingga dari beragam kebutuhan yang disuarakan dapat difasilitasi oleh dinas terkait dalam bentuk kebijakan yang memihak kepentingan perempuan tani.

Dalam kajian kesempatan politik (*political opportunity*) dalam gerakan sosial, dapat dilihat secara internal KWT tidak memiliki resources yang memadai untuk beragam kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan, tetapi KWT memiliki jejaring yang kuat di pemerintahan sebagai sumberdaya eksternal (*external resources*) sehingga dapat berkolaborasi KWT dalam melakukan pemberdayaan disamping membantu dinas terkait untuk mengimplementasikan kebijakannya.

REFERENCES

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (fifth). United State of America: SAGE Publications.
- Fitri, A. I., & Akbar, I. (2017). Gerakan Sosial Perempuan Ekofeminisme Di Pegunungan Kendeng Provinsi Jawa Tengah Melawan Pembangunan Tambang Semen. *CosmoGov*, 3(1), 83. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v3i1.12634>
- Hamid, A., Nurrohman, B., Hikmawan, D., & Ramadhan, G. (2020). *The Rise of Young*

Enterpreneurial Farmers in Banten , Indonesia. 24(10), 1794–1807.

Hikmawan, M. D., Indriyany, I., & Mayrudin, Y. (2019). Environmental Movement Against Mining Exploration in Bojonegara Serang Banten. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 367(ICDeSA), 278–282.*
<https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.57>

Indriyany, I., Hikmawan, M. D., & Mayrudin, Y. (2019). The Movement of Women with Disabilities on Indonesia's Legislative Election 2019. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research, 367(ICDeSA), 289–294.*
<https://doi.org/10.2991/icdesa-19.2019.59>

Karl Dieter, O. (2009). *Theories of Political Protest and Social Movement: A Multidisciplinary Introduction, Critique, and Synthesis.* New York: Routledge.

McAdam, D. (1982). *Political Process and the Development of Black Insurgency, 1930-1970.* Chicago: The University of Chicago Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis.*
<https://doi.org/10.4324/9780203093801.ch12>

Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation.* Los Angeles: University of California Press.

Priyatna, A., Subekti, M., & Rachman, I. (2017). Ekofeminisme Dan Gerakan Perempuan Di Bandung. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya, 9(3), 439.*
<https://doi.org/10.30959/patanjala.v9i3.5>

Restu, P. (2017). Girls Punk: Gerakan Perlawanan Subkultur di Bawah Dominasi Maskulinitas Punk. *Jurnal Sosiologi: Dialektika Masyarakat, 1(1)(2615–7500), 103115.*

Schumpeter, J. A. (2017). Capitalism, Socialism and Democracy. In *Modern Economic*

Classics-Evaluations Through Time. London: Routledge.

Smelser, N. J. (2011). *Theory of Collective Behavior*. Louisiana: Quid Pro Books.

Strempe, A. (2011). *Kelompok Tani : Penilaian Kebutuhan Proyek untuk perempuan*. Aceh.

Sulfiana, I. (2019). *Pemberdayaan Perempuan Melalui Kelompok Wanita Tani Maju Makmur Cilegon*. UIN SMH BANTEN.

Yin, R. K. (2003). *Case Study Research, Design and Methods*. California: SAGE Publications.

Zulhaedar, F., & Mardiana. (2016). Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN ANALISIS DAYA SAING LADA HITAM DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR. *Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN*, (1), 1604–1610.